

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai peranan audit internal, *good corporate governance* dan kualitas laporan keuangan.

2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Definisi Audit Internal

Definisi audit internal menurut Sukrisno Agoes (2017:238) adalah sebagai berikut :

“Internal Audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-kententuan dari ikatan profesi yang berlaku”.

Sedangkan menurut *Institute of Internal Auditor* yang dikutip oleh Arens dkk (2015:432) dan di alih bahasakan oleh Herman Wibowo, mendefinisikan bahwa :

“Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan assurance yang objektif serta independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola”.

Adapun menurut Mulyadi (2014:28) mendefinisikan bahwa audit internal yaitu sebagai berikut:

“Audit Internal adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara ataupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak untuk dipatuhi, penjagaan terhadap kekayaan organisasi, efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan atau teori-teori diatas penulis menyimpulkan bahwa audit internal adalah suatu kegiatan pemeriksaan atau penilaian yang dilakukan oleh bagian internal dalam sebuah perusahaan baik di perusahaan negara ataupun perusahaan swasta terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi secara objektif serta independen dan memberikan keandalan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Tujuan Audit Internal

Tujuan audit internal menurut Tugiman yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:255) mengatakan bahwa :

“Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Pemeriksaan internal melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2013:205) mengatakan bahwa tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberkan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan

yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. “Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal
- b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen
- c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan
- d. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya
- e. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen
- f. Menyarankan perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas”.

Adapun menurut menurut Lawrence B. Sawyer (2005) dalam jurnal Wati (2018) mengatakan bahwa :

“The purpose of Internal Audit is to assist the organization in planning and conducting audits, as well as evaluating the follow-up of audit results. Identifying all possibilities to improve the efficiency of resource use also recommends a thorough improvement of the internal and operational control systems objectively. Ensuring compliance with laws, regulations and policies that apply in the organization”.

Dan di terjemahkan oleh penulis bahwa tujuan audit internal adalah untuk membantu organisasi dalam merencanakan dan melakukan audit, serta mengevaluasi tindak lanjut dari hasil audit. Mengidentifikasi semua kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya juga merekomendasikan peningkatan kontrol internal dan operasional sistem secara objektif. Memastikan kepatuhan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di organisasi.

2.1.1.3 Komponen Audit Internal

Menurut Mulyadi (2014:28) yang termasuk kedalam komponen audit internal yaitu :

“Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak untuk dipatuhi, pengamanan terhadap kekayaan (aktiva) organisasi, efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

Penjelasan komponen audit internal dijelaskan menurut Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal butir 2130 (2017:25) yaitu:

1. “Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk dipatuhi
Auditor internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang mungkin berdampak jelas terhadap kegiatan serta laporan dan menentukan apakah organisasi mematuhi.
2. Pengamanan terhadap kekayaan (aktiva) organisasi
Auditor internal harus meninjau alat untuk melindungi aset, memberikan rekomendasi dan membuktikan keberadaannya serta memeriksa dan mengevaluasi sampai sejauh mana aset perusahaan dipertanggungjawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
3. Efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi
Auditor internal harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya serta memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu auditor internal harus mengevaluasi potensi timbulnya kecurangan dan bagaimana organisasi mengelola risiko tersebut.
4. Keandalan informasi
Auditor internal perlu memastikan apakah manajemen senior dan dewan memiliki pemahaman yang jelas bahwa keandalan dan integritas informasi adalah tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab ini mencakup keseluruhan informasi penting organisasi, terlepas dari bagaimana cara informasi tersebut disimpan. Informasi keandalan dan integritas di sini termasuk akurasi, kelengkapan, dan keamanan”.

Adapun menurut Boyton, dkk (2001:983) yang di alih bahasakan oleh Paul, dkk dalam buku Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:257) audit internal harus

mencakup kecukupan dan efektivitas sistem kinerja organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan :

1. “Keandalan dan menyokong informasi
2. Sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontak
3. Pengamanan aktiva
4. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien
5. Tercapainya target yang ditetapkan dan tujuan program operasi”.

Penjelasan komponen audit internal dijelaskan menurut Hery (2017:281) yaitu:

1. “Keandalan informasi
Pemeriksa internal harus meninjau keandalan (reliabilitas dan integritas) berbagai informasi finansial dan pelaksanaan pekerjaan atau operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melapor informasi.
2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan
Pemeriksa internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki. Jadi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam menentukan apakah sistem tersebut telah mencakupi dan efektif serta apakah berbagai kegiatan yang diperiksanya benar-benar telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
3. Perlindungan terhadap asset
Pemeriksa internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi asset terhadap berbagai jenis kerugian seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang illegal atau tidak pantas dan, bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan suatu asset. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu asset, pemeriksa harus mempergunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien
Pemeriksaan yang berhubungan dengan keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya haruslah mengidentifikasi berbagai keadaan seperti:
 - a. Fasilitas-fasilitas yang tidak dipergunakan sepenuhnya;
 - b. Pekerjaan yang tidak produktif;
 - c. Berbagai prosedur yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan biaya, dan
 - d. Terlalu banyak atau sedikitnya jumlah staf
5. Pencapaian tujuan
Pemeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana”.

2.1.1.4 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Audit internal merupakan alat bantu bagi manajemen untuk menilai efesien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan, kemudian memberikan saran atau rekomendasi dan nilai tambah bagi manajemen yang dapat dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya.

Menurut Mulyadi (2010:211), mengatakan bahwa fungsi audit internal dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. "Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilaipengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai tugas organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
2. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentarpentingterhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa-jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada unit atas catatan akuntansi”.

Sedangkan menurut konsersium organisasi profesi audit internal (2004) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:256) mengatakan bahwa penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efesien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Menurut M.Guy (2002) yang diterjemahkan oleh Sugiyarto dan dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:256) mengatakan bahwa:

“Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta aktivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan”.

Sedangkan Menurut Alfred (2012:6), ruang lingkup aktivitas audit internal adalah sebagai berikut:

1. “Penilaian yang bebas atas semua aktivitas di dalam perusahaan (induk dan anak perusahaan). Dapat menggunakan semua catatan yang ada dalam perusahaan/grup perusahaan, dan memberikan advice kepada pimpinan perusahaan, baik direktur utama maupun direktur lainnya.
2. Me-review dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.
3. Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari pencurian dan kehilangan.
5. Memastikan dapat dipercayainya data-data akuntansi dan data lainnya yang disajikan oleh perusahaan.
6. Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham.
7. Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang dilakukan, identifikasi masalah, dan saran/solusi yang harus diberikan.
8. Bekerja sama dengan eksternal auditor sehubungan dengan penilaian atas pengendalian internal (internal control)”.

2.1.1.5 Wewenang dan Tanggungjawab Audi Internal

Wewenang dan tanggung jawab auditor internal menurut Hudri Chandry (2009:10) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:257) mengatakan bahwa:

“Wewenang dan tanggung jawab auditor internal dalam suatu organisasi juga harus ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus memberikan keleluasaan auditor internal untuk melakukan audit terhadap catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang sedang berjalan dan para pegawai badan usaha”.

Sedangkan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:257) mengatakan bahwa:

“Auditor internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya tersebut. Auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”.

Adapun menurut Amin Widjaja (2012:21) dalam mengungkapkan bahwa :

“Tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit internal, mengarahkan personel dan aktivitas departemen audit internal, menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan”.

Dapat disimpulkan bahwa auditor dalam menjalankan tugas nya yaitu dapat memberikan informasi dan saran-saran kepada pihak manajemen atas kelemahan yang ditemukannya dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dan tujuan perusahaan.

2.1.1.6 Pelaksanaan dan Pelaporan Audit Internal

2.1.1.6.1 Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan audit internal menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal adalah mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Adapun proses pelaksanaan audit internal, antara lain:

1. Perencanaan Audit

Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal. Perencanaan dibuat bertujuan menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit,

perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan proses audit.

Menurut Hiro Tugiman (2002) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:261) mengatakan bahwa audit internal harus merencanakan setiap pemeriksaan. Oleh karena itu, perencanaannya harus di dokumentasikan dan harus meliputi:

- a. “Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan
- b. Informasi dasar tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa
- c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit
- d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu
- e. Pelaksanaan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, resiko-resiko dan pengawasan
- f. Penulisan program audit
- g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan
- h. Persetujuan bagi rencana kerja audit”.

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Pada tahap pengujian dan pengevaluasian informasi audit internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit.

Menurut Hiro Tugiman (2002) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:263) mengatakan bahwa proses pengujian dan pengevaluasian informasi yaitu:

- a. “Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja
- b. Informasi harus mencakup, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi
- c. Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk teknik-teknik pengujian
- d. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, menganalisisan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi
- e. Dibuat kertas kerja pemeriksaan”.

3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Laporan audit internal ditunjukkan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit internal harus melaporkan kepada pihak manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan yang terjadi di perusahaan dan memberikan saran/rekomendasi untuk perbaikannya.

Menurut Hiro Tugiman (2006) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:263) mengatakan bahwa audit internal harus melaporkan hasil auditan yang dilaksanakannya secara tertulis dengan ketentuan laporan, sebagai berikut:

- a. “Ditandatangani oleh ketua audit internal
- b. Objektif, jelas, singkat, terstruktur dan tepat waktu
- c. Mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan
- d. Mencantumkan berbagai rekomendasi
- e. Mencantumkan pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi
- f. Perseujuan pimpinan audit me-review dan menyetujui laporan audit”.

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Audit internal terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit internal harus memastikan suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima resiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

2.1.1.6.2 Pelaporan Audit Internal

Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan ini merupakan alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak manajemen.

Menurut Arens, dkk (2008) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:264) mengatakan bahwa:

“Tahap akhir dalam proses audit adalah menyampaikan laporan audit yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan ini harus memberi tahu para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan juga memiliki bentuk yang berbeda dan bervariasi mulai dari jenis yang sangat teknis yang biasanya dikaitkan dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan yang sederhana dalam audit operasional atas efektivitas suatu departemen kecil”.

Menurut Boyton, dkk (2001) yang di alih bahasakan oleh Paul, dkk dan dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:265) mengungkapkan bahwa:

“Hasil akhir pelaksanaan audit internal dituangkan dalam bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil kerja kepada manajemen, yaitu media informasi untuk menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan. Isi atau materi laporan audit internal, yaitu :

1. Objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu
2. Menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil audit dan apabila tepat, laporan itu juga berisi suatu pernyataan pendapat auditor
3. Mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang potensial dan mengakui kinerja serta tindakan korektif yang memuaskan”.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

2.1.2.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Menurut Khotibul Umam dan Veri Antoni (2018:127), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

“*Good Corporation Governance (GCG)* berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya”.

Sedangkan definisi *Good Corporate Governance* menurut I Putu Jati Arsana (2016:391) adalah sebagai berikut :

“*Good Corporate Governance* adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu Negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif”.

Adapun menurut Kerja sama antara Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) (2014:246), mendefinisikan bahwa :

“*Good Corporation Governance (GCG)* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberi pertanggungjawabannya kepada *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya”.

Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan dan memberi pertanggungjawabannya kepada *shareholder* dan *stakeholder* serta mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Tujuan penerapan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Tjager dkk (2003) dalam buku Sukrisno Agoes dan Cenik Ardana (2014:106) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu:

1. “Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.
2. Berdasarkan analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
3. Internasionalisasi pasar –termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal– menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG
4. Kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini banyak berubah
5. Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan”.

Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2007) dalam buku Sukrisno

Agoes dan Cenik Ardana (2014:106) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah:

1. “Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing
2. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum”.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Muh. Arief Effendi (2016:11) prinsip *Good Corporate*

Governance biasanya dikenal dengan singkatan TARIF yaitu:

“*Transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independent* (idenpendensi) and *fairness* (kesetaraan)”.

Penjelasan dari prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diungkapkan oleh Menteri Negara BUMN dalam buku Sukrisno Agoes dan Cenik Ardana (2014:104) yaitu:

1. “Perlakuan yang setara (*fairness*) merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal)

maupun kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya). Hal inilah yang memunculkan konsep stakeholder (seluruh kepentingan pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan stakeholder (pemegang saham saja).

2. Prinsip transparansi (disebut juga prinsip keterbukaan), artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, menyesatkan, ditutup-tutupi atau ditunda-tunda dalam pengungkapannya.
3. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statement*) yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.
4. Prinsip *responsibilitas* (lebih sering disebut prinsip tanggungjawab) adalah prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepadanya. Prinsip tanggungjawab ada sebagai kosekuensinya logis dari kepercayaan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan. Tanggungjawab ini mempunyai lima dimensi, yaitu: ekonomi, hukum, moral, sosial dan spiritual.
5. Kemandirian sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, artinya suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan/pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat”.

Sedangkan menurut Minarni (2013:131) mengatakan bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukannya landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan *good corporate governance* sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip *good corporate governance*, yaitu:

1. “Keterbukaan (*transparency*)
Perusahaan memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi material dan relevan, baik yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta informasi penting lainnya yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan *stakeholder* lainnya. Informasi tersebut

disampaikan dengan cepat, akurat dan mudah diakses oleh siapapun dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.

2. Akuntabilitas (*accountability*)
Jajaran manajemen memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
Perusahaan memastikan pengelolaan usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Selain itu, pertanggung jawaban perusahaan juga berbentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
4. Profesional
Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)
Setiap keputusan yang diambil senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya dari rekyasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun menurut Eddy Soeryanto (2014:481) mengatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) menekankan pada pengelolaan bisnis yang melibatkan kepentingan *stakeholder* serta penggunaan sumber daya yang berprinsip keadilan, efesinsi, transparansi dan akuntabilitas, dengan prinsip sebagai berikut:

1. “GCG sebagai suatu sistem mengatur bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan guna meningkatkan kemakmuran bisnis secara akuntabel untuk memberi nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan pemangku kepentingan lain
2. GCG sebagai suatu struktur memberikan kejelasan, fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang berkepentingan atas perusahaan guna mewujudkan pengawasan internal dan eksternal yang efektif serta keseimbangan internal (antarorganisasi perusahaan) dan eksternal (antar *stakeholder*”.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Definisi Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Winwin Yadiati & Abdulloh Mubarak (2017:6). Definisi kualitas laporan keuangan adalah :

“Suatu laporan keuangan dianggap berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan, laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang dapat menghasilkan output berupa informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan”.

Adapun menurut Ahmad Ilham Sholihin (2013:388) mengatakan bahwa :

“Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Maksudnya, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar”.

Sedangkan menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:6) mengatakan:

“Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi syarat laporan keuangan berkualitas, yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*)”.

Dari beberapa definisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang disusun secara sistematis agar dapat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk pengambilan keputusan yang dapat diandalkan, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.1.3.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Firman Menne (2017:10) karakteristik yang digunakan dalam kualitas laporan keuangan yaitu dapat memenuhi kebutuhan *stakeholder* secara tegas dan meyakinkan seperti relevan,

dapat dipercaya, dapat dibandingkan dapat dipahami dan konsisten. Sedangkan menurut Hery (20017:88) yaitu dapat dipahami, Periode pelaporan, dapat dibandingkan, konsisten penyajian, keandalan, relevan, saling hapus (*off setting*), materialitas dan agregasi dan tepat waktu.

Adapun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No.1, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu sebagai berikut:

1. “Dapat Dipahami
Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami atau *understandable* oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan dengan latar belakang pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan Bahasa yang sederhana, singkat, formal, dan mudah dipahami. Namun perlu diketahui, penyajian informasi yang mudah dipahami ada kalanya sulit dilakukan. Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan ataupun industri yang sulit dipahami oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut harus tetap dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.
2. Relevan
Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Sebab jika tidak, maka laporan keuangan tidak akan memberikan manfaat bagi para penggunanya dalam melakukan evaluasi keuangan entitas bisnis tersebut. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip material atau dengan kata lain laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
3. Dapat Dipercaya
Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan andal atau dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur sesuai kondisi sebenarnya yang dapat disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.. Disamping itu, laporan keuangan harus disajikan dengan prinsip “*substance over form*” atau penyajian yang lebih mengutamakan hakikat ekonomi ketimbang hakikat formal. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian atau konservatif dan lengkap.

4. Dapat dibandingkan
Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan secara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding, laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten”.

Maka berdasarkan data diatas dapat disimpulkan, penelitian ini menggunakan Indikator dari Kualitas Laporan keuangan yaitu dapat memenuhi kebutuhan stakeholder secara tegas dan meyakinkan seperti relevan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan dapat dipahami tepat waktu dan konsisten penyajian.

2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1 paragraf 10, menjelaskan bahwa:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi”.

Adapun menurut APB Statement No.4 dalam Sofyan S. Harahap (2011:126), laporan ini bersifat deskriptif, dan laporan ini banyak mempengaruhi studi-studi berikutnya tentang tujuan laporan keuangan. Dalam laporan ini tujuan laporan keuangan digolongkan sebagai berikut:

1. “Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP.
2. Tujuan Umum
Adapun tujuan umum laporan keuangan disebutkan sebagai berikut:
 - A. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan dengan maksud:
 - a. untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan,
 - b. untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya,

- c. untuk menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utangnya,
 - d. menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
- B. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud:
- a. Memberikan gambaran tentang dividen yang diharapkan pemegang saham,
 - b. menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, mengumpulkan dana untuk perluasan perusahaan.
 - c. memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan,
 - d. menunjukan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.
- C. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- D. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.
- E. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.
3. Tujuan Kualitatif
- Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB Statemant No.4 adalah sebagai berikut:
- a. *Relevance*
Memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan.
 - b. *Understandability*
Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti pemakainya.
 - c. *Verifiability*
Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.
 - d. *Neutrality*
Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum bukan pihak-pihak tertentu saja.
 - e. *Timeliness*
Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.
 - f. *Comparability*
Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.
 - g. *Completeness*
Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai”.

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, agar pihak perusahaan, manajemen, dapat mengambil keputusan dari laporan dan pihak-pihak yang memakai informasi agar laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance*

Menurut Hery (2017:293) mengatakan bahwa Audit Internal sebagai pengendalian internal harus memiliki peran yang penting dalam mewujudkan terciptanya *Good Corporation Government*. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budi Septiawan (2018) yang berjudul *Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Good Corporate Governance (Survey Pada 3 BUMN Yang Berkantor Pusat Di Kota Bandung)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh antara audit internal terhadap *Good Corporation Governance*.

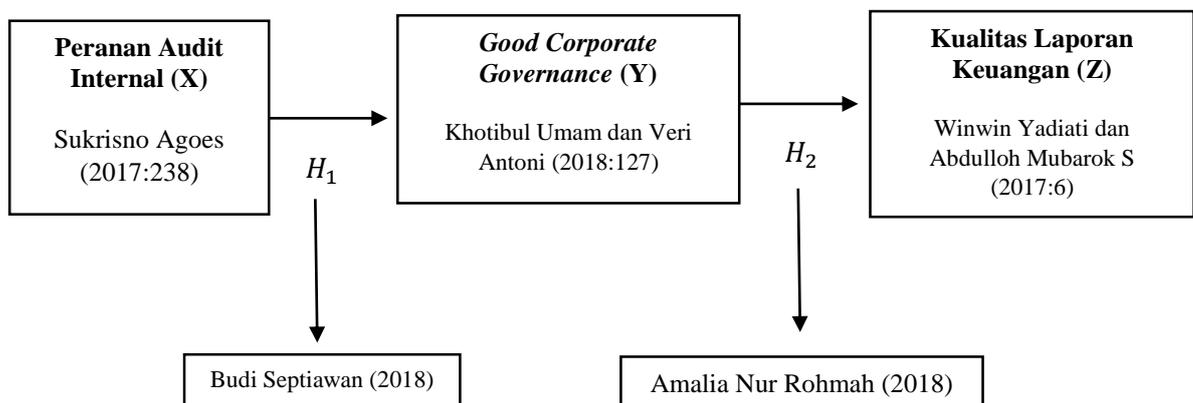
Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan audit internal berpengaruh terhadap *good corporate governance*.

2.2.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut I Putu Jati Arsana (2016:392) mengatakan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia Nur Rohmah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage Keuangan, Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *good corporate governance* berdampak terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penjelasan diatas maka paradigma pemikiran yaitu :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:99) hipotesis adalah:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang revelan, belum didasarkan fakta - fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2010:7) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah ada atau tidaknya pengaruh yang ditimbulkan oleh variable independen (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Z) baik secara langsung maupun tidak langsung, serta untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Peranan audit internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*

H₂ : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan